

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**Halkadri Fitra*, Erfrizal Syofyan, Erni Masdupi,
Erly Mulyani, Salma Taqwa, Halmawati**

Universitas Negeri Padang

*Correspondence: halkadri.fitra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu menyebar kuesioner kepada responden. Populasi penelitian adalah kepala urusan keuangan desa se-Kabupaten Agam dengan pengambilan sampel menggunakan metode *full sampling* berjumlah 92 sampel. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kata kunci: akuntabilitas, komitmen, kompetensi, partisipasi, transparansi

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of apparatus competency, organizational commitment, transparency and community participation on accountability in managing village funds in Agam Regency, West Sumatra Province. This type of research is quantitative research, with data collection using primary data, namely distributing questionnaires to respondents. The research population was heads of village financial affairs throughout Agam Regency with samples taken using the full sampling method totaling 92 samples. The data processing method in this research is the multiple linear regression analysis method. The results of this research show that the variables of apparatus competency, organizational commitment and community participation have a positive but not significant effect on accountability in managing village funds, while transparency has a positive and significant effect on accountability in managing village funds.

Keywords: *accountability, commitment, competence, participation, transparency*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik berkembang cepat di Indonesia serta terus keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah (Aprilya & Fitria, 2020; Bao et al., 2024; Dawkins et al., 2019; Zou et al., 2023). Keberlanjutan merupakan bentuk kepedulian terhadap pemangku kepentingan dan tidak berjalannya keberlanjutan merupakan Tindakan yang mementingkan diri sendiri (Chakhovich & Virtanen, 2023; Suta & Tóth, 2023). Akuntansi sektor publik memiliki mekanisme yang mirip akuntansi swasta namun diberlakukan dalam praktik organisasi publik (Argento & van Helden, 2023; Kristiyani Hamidah, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah sangat mendorong pembangunan ekonomi (Elosegui et al., 2022; Iswardhana & Attamimi, 2023; Sima et al., 2023) dan merupakan peran serta pemerintah daerah beserta masyarakat dalam memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintah pusat ke daerah untuk melaksanakan kegiatan di daerah tertentu berdasarkan azas otonom (Haris et al., 2010; Kartika et al., 2023; Marenzi et al., 2023; Ridwan & Sumirat, 2021). Selanjutnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan penduduk masyarakat setempat dengan berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (UU Nomor 6, 2014).

Pembangunan pedesaan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan melaksanakan pemerintahannya sendiri. Pemberian wewenang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan menata desa dengan baik (Cassinat et al., 2022; Handayani et al., 2023; Nadir, 2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri, 2018).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip akuntansi pemerintah digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah bukan saja pada pemerintah pusat, tapi juga pemerintahan daerah termasuk dalam pemerintahan desa (Aprilya & Fitria, 2020; Sheppard & Beck, 2023). Dana desa merupakan salah satu yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6, 2014). Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 2.226,27 km² yang terbagi dalam 16 kecamatan dengan 92 desa atau nagari (BPS Kabupaten Agam, 2023). Sejauh ini pemerintah pusat telah mengeluarkan dana desa mencapai Rp 539 triliun sejak 2015 hingga 2023 (Sudoyo, 2023).

Pengalokasian dana desa berbeda untuk setiap desa ditinjau dari beberapa faktor seperti angka kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan dan luas wilayah. Penghitungan jumlah indikasi kebutuhan Dana Desa dengan memperhatikan prioritas nasional, kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa, hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa, serta kemampuan Keuangan Negara (PP Nomor 37, 2023). Tujuan disalurkan dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam memberdayakan dan melindungi desa untuk menjadi kuat dan maju (Hilmawan et al., 2023; Nontapet et al., 2022).

Fenomena yang ditemukan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban desa belum sepenuhnya mengikuti standar dan cukup rawan untuk dimanipulasi, serta rendahnya efektivitas inspektorat daerah melakukan pengawasan, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat, kemudian belum jelasnya batasan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat, serta sumber daya manusia yang belum mencukupi (Cahyana & Suprasto, 2023; Hasniati, 2016; Pramesti, 2015; Rahmayanti Yusuf et al., 2022). Selain hal tersebut faktor kompetensi perangkat desa, aplikasi system keuangan desa, kepatuhan pajak bendaharawan desa, partisipasi masyarakat juga tidak ketinggalan dalam menciptakan akuntabilitas penggunaan dana desa (Aprilya & Fitria, 2020; Dewi et al., 2022; Hasanah et al., 2020; Irfan Kamil & Krisiandi, 2022; Luthfiani et al., 2020; Oci et al., 2023) yang harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan oleh (Apriliyani et al., 2018; Budianto & Febrina, 2020; Dwirini et al., 2023; Gulo & Kakisina, 2023; Mais Dan & Palindri, 2020; Merina & Cahyani, 2023; Nuraeni & Kusuma, 2021; Sumpeno, 2011),

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan adanya populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2018). Populasi penelitian ini adalah semua kepala urusan keuangan desa yang ada di kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sebanyak 92 Desa. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan eknik *full sampling*. Sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Keuangan Desa. Pengumpulan data menggunakan formulir kuesioner disampaikan langsung kepada Kepala Urusan Keuangan Desa se-Kabupaten Agam. Jawaban menggunakan skala likert 1-5 berdasarkan tingkat kesetujuan responden yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju (TS); 3 = Normal (N); 4 = Setuju (S); dan 5 = Sangat Setuju (SS).

Variable terikat adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) sedangkan variabel bebas terdiri atas 4 variabel yaitu Kompetensi Aparatur (KAP), Komitmen Organisasi (KO), Transparansi (TR) dan Partisipasi Masyarakat (PM), sedangkan. Variabel APDD diukur

menggunakan 7 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Mahmudi., 2011), variable KAP menggunakan 7 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Edison & I. Komariyah, 2016), variable KO menggunakan 6 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Porter et al., 1974), variable TR menggunakan 5 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Renggo, 2018) dan variable PM menggunakan 5 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Heller et al., 1984; Sujarweni, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Heteroskedastisitas, Uji Heteroskedastisitas diukur dengan melihat nilai signifikansi dari semua variabel independen jika lebih besar 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2018). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa (KAP), komitmen organisasi (KO), transparansi (TR), partisipasi Masyarakat (PM) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (APDD) dengan persamaan penelitian adalah sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KAP + \beta_2 KO + \beta_3 TR + \beta_4 PM + e$$

Keterangan: APDD : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; α : Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi variable bebas; KAP : Kompetensi Aparatur; KO : Kompetensi Organisasi; TR : Transparansi; PM : Partisipasi Masyarakat; dan e : Error

Uji-t bertujuan melihat signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dan variabel lain dianggap konstan (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan: (1) derajat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima dan jika tidak maka hipotesis ditolak; dan (2) membandingkan t hitung dengan t table, jika nilai t hitung > t table maka hipotesis diterima, dan jika tidak maka dipotesis ditolak. Uji F untuk menguji hubungan semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan cara: (1) derajat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, dan jika tidak maka hipotesis ditolak; dan (2) membandingkan f hitung dengan f table, jika nilai f hitung > f table maka hipotesis diterima, dan jika tidak maka dipotesis ditolak. Uji Koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kemampuan variasi variabel bebas terhadap variable terikat (Ghozali, 2018). Nilai R^2 memiliki interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), mendekati 1 maka semakin baik sedangkan apabila semakin mendekati 0, maka variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

| Description | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| APDD1 | 128.7333 | 79.582 | .502 | .941 |
| APDD2 | 128.5333 | 80.947 | .385 | .942 |
| APDD3 | 128.6667 | 78.437 | .639 | .940 |
| APDD4 | 128.4000 | 81.214 | .444 | .941 |
| APDD5 | 128.5667 | 79.289 | .571 | .940 |
| APDD6 | 128.8333 | 78.695 | .616 | .940 |
| APDD7 | 128.8333 | 77.868 | .714 | .939 |
| KAP1 | 128.7000 | 80.079 | .447 | .942 |
| KAP2 | 128.8667 | 77.913 | .721 | .939 |
| KAP3 | 128.6667 | 77.678 | .727 | .939 |
| KAP4 | 128.7667 | 77.151 | .783 | .938 |
| KAP5 | 128.6333 | 78.309 | .662 | .939 |
| KAP6 | 129.0333 | 79.344 | .483 | .941 |
| KAP7 | 128.8667 | 79.223 | .565 | .940 |
| KO1 | 128.8333 | 79.109 | .568 | .940 |
| KO2 | 129.2667 | 77.926 | .510 | .942 |
| KO3 | 128.6667 | 77.678 | .727 | .939 |
| KO4 | 129.2000 | 80.924 | .443 | .942 |
| KO5 | 129.2000 | 78.924 | .522 | .941 |
| KO6 | 129.0000 | 79.586 | .602 | .940 |
| TR1 | 128.7000 | 79.045 | .494 | .941 |
| TR2 | 128.7000 | 79.045 | .564 | .940 |
| TR3 | 128.6333 | 80.585 | .398 | .942 |
| TR4 | 128.9333 | 78.409 | .698 | .939 |
| TR5 | 128.7333 | 79.582 | .502 | .941 |
| PM1 | 128.8333 | 78.213 | .673 | .939 |
| PM2 | 128.9333 | 79.513 | .561 | .940 |
| PM3 | 128.6333 | 79.551 | .517 | .941 |
| PM4 | 128.6000 | 78.455 | .656 | .939 |
| PM5 | 128.8000 | 78.234 | .662 | .939 |

Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa Nilai Corrected Item-Total Correlation untuk semua item pertanyaan > 0,374 sehingga dikatakan valid. Selanjutnya berdasarkan Tabel 4 juga diketahui Nilai nilai Cronbach's Alpha if item Deleted masing-masing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60, maka masing-masing item pernyataan adalah reliabel. Sedangkan Tabel 2 menjelaskan bahwa nilai Sig adalah 0,200 > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa semua data indicator variabel penelitian ini terdistribusi secara normal sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 30 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .11417674 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .081 |
| | Positive | .065 |
| | Negative | -.081 |
| Test Statistic | | .081 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Kompetensi Aparatur Pengelola (KAP) | 0,300 | 3,337 |
| Komitmen Organisasi (KO) | 0,435 | 2,299 |
| Transparansi (TR) | 0,674 | 1,483 |
| Partisipasi Masyarakat (PM) | 0,266 | 3,765 |

Sumber: data olahan

Tabel 3 diketahui bahwa semua variable memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Sedangkan Tabel 4 diketahui nilai signifikansi dari semua variabel bebas (KAP, KO, TR dan PM) lebih besar 0,05, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .384 | .171 | | 2.242 | .034 |
| Kompetensi Aparatur Pengelola (KAP) | .073 | .060 | .408 | 1.226 | .232 |
| Komitmen Organisasi (KO) | -.054 | .050 | -.295 | -1.068 | .296 |
| Transparansi (TR) | -.044 | .037 | -.267 | -1.204 | .240 |
| Partisipasi Masyarakat (PM) | -.043 | .067 | -.229 | -.647 | .523 |

Sumber: data olahan

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 1.581 | 1.469 | |
| Kompetensi Aparatur Pengelola (KAP) | .243 | .141 | .234 |
| Komitmen Organisasi (KO) | .058 | .133 | .054 |
| Transparansi (TR) | .254 | .117 | .271 |
| Partisipasi Masyarakat (PM) | .124 | .292 | .042 |

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 $APDD = 1,581 + 0,243 KAP + 0,058 KO + 0,254 TR + 0,124 PM$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) akuntabilitas pengelolaan dana desa apabila KAP, KO, TR dan PM = 0, adalah bernilai 1,581.
2. Koefisien KAP dengan nilai 0,243, sehingga disimpulkan variable kompetensi aparatur mempunyai arah positif untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya apabila makin tinggi kompetensi aparatur maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Koefisien KO dengan nilai 0,058, sehingga disimpulkan variable komitmen organisasi mempunyai arah positif untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya apabila makin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Koefisien TR dengan nilai 0,254, sehingga disimpulkan variable transparansi mempunyai arah positif untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya apabila makin tinggi transparansi maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Koefisien PM dengan nilai 0,124, sehingga disimpulkan variable partisipasi masyarakat mempunyai arah positif untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya apabila makin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 6
Hasil Uji t

| Variabel | t | Sig. | Keterangan |
|-----------------------------|-------|------|------------------|
| Kompetensi Aparatur (KAP) | 1.724 | .089 | Tidak Signifikan |
| Komitmen Organisasi (KO) | .439 | .662 | Tidak Signifikan |
| Transparansi (TR) | 2.166 | .033 | Signifikan |
| Partisipasi Masyarakat (PM) | .425 | .672 | Tidak Signifikan |

Sumber: data olahan

Tabel 6 memperlihatkan bahwa:

1. Variabel kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh signifikan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana nilai t hitung $1,724 < 1,989$ dan nilai signifikan $0,089 > 0,05$.
2. Variable komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana nilai t hitung $0,439 < 1,989$ dan nilai signifikan $0,662 > 0,05$.
3. Variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana nilai t hitung $2,166 > 1,989$ dan nilai signifikan $0,033 < 0,05$.
4. Variabel partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana nilai t hitung $0,425 < 1,989$ dan nilai signifikan $0,672 > 0,05$.

Tabel 7
Hasil Uji-F

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 3.215 | 4 | .804 | 6.173 | .000 ^b |
| Residual | 10.546 | 81 | .130 | | |
| Total | 13.761 | 85 | | | |

Sumber: data olahan

Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai F-hitung $6,173 > F$ -tabel 2,716 sehingga variable bebas yang terdiri dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Tabel 8 menyajikan hasil koefisien determinasi (R Square) 0,234 atau 23,4% yang berarti variabel bebas yang terdiri dari kompetensi aparatur (KAP), komitmen organisasi (KO), transparansi (TR), partisipasi masyarakat (PM) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (APDD) memiliki kontribusi sebesar 23,4% dan sisanya ($100\% - 23,4\% = 76,6\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi tersebut.

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .483 ^a | .234 | .196 | .36083 |

Sumber: data olahan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan perhitungan bahwa nilai t-hitung sebesar $1,724 < 1,989$ dan nilai signifikan sebesar $0,089 > 0,05$; artinya dapat dikatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini seiring dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022; Triyono & Arfiansyah, 2019; Yulianti et al., 2019). Kompetensi menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi substansi pokok dalam pengelolaan laporan keuangan desa, karena sudah terdapat aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu pelaporan keuangan desa yang masih sederhana dan belum menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Aplikasi Siskeudes mudah di[elajari, dipahami, dioperasikan sehingga tidak memerlukan keahlian khusus bagi para penggunanya. Penyedia aplikasi Siskeudes adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah juga aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi penggunaan Siskeudes sehingga dengan demikian meskipun latar belakang pendidikan staf pelaksana tidak sesuai atau berbeda dengan bidang pekerjaan keuangan, namun para pengelola keuangan mampu menyesuaikan diri dan memenuhi pelaksanaan tugasnya.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai t-hitung sebesar $0,439 < 1,989$ dan nilai signifikan sebesar $0,662 > 0,05$; artinya dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh tidak signifikan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fajri, 2015; Ferina, 2016; Indriasih et al., 2022; Mamelolo, 2016). Tidak signifikannya pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas karena dalam akuntabilitas terdapat beberapa elemen penting, yaitu: (1). Komitmen terhadap organisasi untuk akuntabilitas dan pelaksanaan kebijakan internal yang memenuhi standar eksternal, (2). Mekanisme penerapan kebijakan privasi, termasuk alat, pelatihan dan pendidikan, (3). Pemantauan internal dan eksternal dan sistem inspeksi jaminan, (4). Transparansi dan mekanisme partisipasi individu, dan (5). Sarana Pemulihan dan Penegakan Eksternal (Cavoukian et al., 2010) sehingga untuk kedepannya komitmen organisasi harus ditingkatkan karena memegang peranan penting terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai t-hitung $2,166 > 1,989$ dan nilai signifikan $0,033 < 0,05$; artinya variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini seiring dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Indriasih et al., 2022; Mualifu & Hermawan, 2019; Ngakil & Kaukab, 2020; Situngkir & Simarmata, 2022). Transparansi pada desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sudah tergolong baik, hal ini terlihat dari segala informasi yang berkenaan dengan program desa, alokasi dana desa dan informasi keuangan lainnya dapat diketahui masyarakat dari media seperti papan pengumuman, baliho, email, cetakan siskeudes, arsip di kantor desa, serta keterbukaan pengambilan Keputusan, penyusunan rencana anggaran yang dilakukan melalui rapat musrenbang, kemudian sosialisasi rencana anggaran dan pembelanjaan desa yang transparan. Begitu juga dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan atau proyek telah dibuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya dan dana.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa $t\text{-hitung } 0,425 < 1,989$ dan nilai signifikan $0,672 > 0,05$; artinya dapat variable partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini serupa dengan beberapa penelitian yang ada sebelumnya yang menghasilkan temuan bahwa partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Aprilya & Fitria, 2020; Simanjuntak et al., 2023). Namun beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Amaliya & Maryono, 2020; Irmawati, 2022; Mada et al., 2017). Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, maka sudah seharusnya masyarakat harus lebih aktif untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada penyelenggara dan pelaksana pemerintahan desa melalui lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa maupun sumbangan pemikiran yang membangun sehingga menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan transparansi menunjukkan hasil pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa juga memerlukan orang yang komit dalam melakukan pekerjaannya dan memiliki tanggungjawab yang lebih terhadap tugasnya. Selanjutnya untuk pengelolaan dana desa juga membutuhkan adanya keterbukaan terhadap informasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa karena keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, R., & Maryono. 2020. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 122–133.
- Apriliyani, N. V., Saefudin Zenju, N., & Heriyati, A. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. 2020. Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Argento, D., & van Helden, J. 2023. Are public sector accounting researchers going through an identity shift due to the increasing importance of journal rankings? *Critical Perspectives on Accounting*, 96.
- Bao, H. X. H., Wang, Z., & Wu, R. L. 2024. Understanding local government debt financing of infrastructure projects in China: Evidence based on accounting data from local government financing vehicles. *Land Use Policy*, 136.
- BPS Kabupaten Agam. 2023. *Kabupaten Agam Dalam Angka 2023*.
- Budianto, R., & Febrina, R. 2020. Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 344–354.
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 556.
- Cassinat, J. J., Cassinat, K. C., Segi, T., Tavana, N. G., & Gill, R. A. 2022. Traditional village roles and gender shape Samoan perceptions of climate change. *Current Research in Environmental Sustainability*, 4.

- Cavoukian, Ann & Taylor, Scott & Abrams, Martin. 2010. Privacy by Design: essential for organizational accountability and strong business practices. *Identity in the Information Society*. 3(2). 405-413
- Chakhovich, T., & Virtanen, T. 2023. Accountability for sustainability – An institutional entrepreneur as the representative of future stakeholders. *Critical Perspectives on Accounting*, 91.
- Dawkins, E., André, K., Axelsson, K., Benoist, L., Swartling, Å. G., & Persson, Å. 2019. Advancing sustainable consumption at the local government level: A literature review. *Journal of Cleaner Production*, 231, 1450–1462.
- Dewi, N. M. A. M., Sudiana, I. W., & Putra, C. G. B. 2022. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 85–95.
- Dwirini, Rahmawati, M., & Abukosim. 2023. Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(4), 559–568.
- Edison, E. , Y. A., & I. Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Elosegui, P., Herrera-Gomez, M., & Colina, J. 2022. Inter-provincial trade in Argentina: Financial flows and centralism. *Regional Science Policy and Practice*, 14(6), 270–291.
- Fajri, R. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1099–1104.
- Ferina, I. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14, 321–336.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, BP Universitas Diponegoro.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 39–43.
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. 2023. Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089.
- Haris, Syamsuddin, 2007, *Desentralisasi dan otonomi daerah:Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LIPI
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1).
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Heller, K., R.H. Price, S. Reinharz, S. Riger, & A. Wandersman. 1984. *Psychology and Community Change: Challenges of the future*, 2nd ed. Homewood, IL Dorsey.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. 2023. Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4).
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. 2022. Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972–981.
- Irfan Kamil, & Krisiandi. 2022, KPK Mulai Pembentukan 10 Desa Antikorupsi, Ini Daftarnya. *Kompas*, 1–1.
- Irmawati. 2022. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–12.

- Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. 2023. Efektifitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan di Bandung Barat Tahun 2019. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2).
- Kartika, A. A., Sitorus, A. M., Siagian, P. A., Panjaitan, R., & Lubis, P. K. D. 2023. Pengimplementasian Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research* , 3(6), 8522–8531.
- Kristiyani Hamidah, D. 2020. Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik di Era Digital, 22(2).
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, G. M. A. 2022. Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 8(2), 106–115.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press.
- Mais Dan, R., & Palindri, L. 2020. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa. In *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1).
- Mamelo, G. 2016. Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7, 148–159.
- Marenzi, A., Rizzi, D., Zanette, M., & Zantomio, F. 2023. Regional institutional quality and territorial equity in LTC provision. *Journal of the Economics of Ageing*, 26.
- Merina, C. I., & Cahyani, A. P. R. 2023. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pengabuan Kecamatanabab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 56–72.
- Mualifu, G. A., & Hermawan. 2019. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1, 49–59.
- Nadir, S. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Universitas Jenderal Soedirman*, 3(2), 92–107.
- Nontapet, O., Maneerattanasak, S., Jaroenpool, J., Phumee, A., Kracha, W., Napet, P., Rahman, M. S., & Suwanbamrung, C., 2022. Understanding dengue solution and larval indices surveillance system among village health volunteers in high- and low-risk dengue villages in southern Thailand. *One Health*, 15.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Habib Al-Ra, Z. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443–456.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. 1974. Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among Psychiatric Technicians J. *Journal of Applied Psychology*, 59(5).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

- Pramesti, S. 2015. *KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa*, diakses melalui website <https://nasional.sindonews.com/berita/1012030/13/kpk-temukan-14-potensi-masalah-pengelolaan-dana-desa>
- Rahmayanti Yusuf, N. A., Hidayat, R., & Djabbar, I. 2022. *Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Secara Akuntabel*.
- Renggo, B. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kalapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. 2021. *Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(3), 55-68
- Sheppard, G., & Beck, M. 2023. *Transparency trade-offs in the operation of national Public Private Partnership units: The case of Ireland's National Development Finance Agency*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(4).
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. 2023. *The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries*. *Heliyon*, 9(9).
- Simanjuntak, A., Sagala, F., & Putri, S. D. 2023. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Manajemen*, 9(1), 1–12.
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. 2022. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir)*. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 96–104.
- Sudoyo, W. 2023, *Presiden: Pemerintah Kucurkan Dana Desa Rp539 Triliun sejak 2015*, diakses melalui website <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/769810/presiden-pemerintah-kucurkan-dana-desa-rp539-triliun-sejak-2015>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*, Edisi Revisi
- Suta, A., & Tóth, Á. 2023. *Systematic review on blockchain research for sustainability accounting applying methodology coding and text mining*. *Cleaner Engineering and Technology*, 14.
- Triyono, A. . F., & Arfiansyah, M. A. 2019. *The Determinant Accountability Of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District)*. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasu. 2019. *Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)*. *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386–398.
- Zou, Q., Mao, Z., Yan, R., Liu, S., & Duan, Z. 2023. *Vision and reality of e-government for governance improvement: Evidence from global cross-country panel data*. *Technological Forecasting and Social Change*, 194.